



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **YUDI ISMONO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**
3. NHK : **104601**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.225.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. Tanah Seluas 98 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/85 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 198.000.000**

1. MOBIL, HONDA BR-V 1.5 MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FAZIO SCOOTER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SCOOTER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOTOR, YAMAHA XMAX SCOOTER Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 7.200.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.430.200.000

III. HUTANG

Rp. 191.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.239.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.